

Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia dalam Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah Terkait Keuangan Negara

Lusia Lestina Halawa ¹, Mira Sukma ², Evlin Limbong ³, Wahjoe Pangestoeti ^{4*}

¹⁻⁴ Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Alamat: Jalan Raya Dompok Tanjungpinang Tel. 085288850999, Provinsi Kepulauan Riau 29124, Indonesia.

Korespondensi penulis: wahjoepangestoeti@umrah.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the financial relationship between the central and regional governments within the framework of fiscal decentralization and its impact on regional economic growth. The main focus is to evaluate the contribution of the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) to Regional Original Revenue (PAD) and the equitable development between regions. Using a quantitative approach, the data was analyzed to assess how fiscal transfer policies support regional financial independence and sustainable development. The findings indicate that DAU and DAK significantly influence PAD growth; however, regional dependency on central government funds remains high. Furthermore, disparities in development between advanced and underdeveloped regions remain a significant challenge. This study recommends optimizing PAD management and implementing more equitable fiscal policies to support balanced development and inclusive economic growth in Indonesia.*

Keywords: *Decentralization, Finance, Development, Policy*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Fokus utama adalah mengevaluasi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemerataan pembangunan antarwilayah. Dengan pendekatan kuantitatif, data dianalisis untuk melihat sejauh mana kebijakan transfer fiskal mendukung kemandirian keuangan daerah dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan DAK memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD, namun ketergantungan daerah terhadap dana pusat tetap tinggi. Selain itu, ketimpangan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal masih menjadi tantangan besar. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi pengelolaan PAD dan kebijakan fiskal yang lebih adil untuk mendukung pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Kata kunci: Desentralisasi, Keuangan, Pembangunan, Kebijakan

1. LATAR BELAKANG

Desentralisasi fiskal adalah aspek penting dalam otonomi daerah di Indonesia. Dalam kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya keuangan mereka secara mandiri. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran serta mempercepat pembangunan daerah. Dengan desentralisasi fiskal, diharapkan kesenjangan pembangunan antar daerah dapat berkurang, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan meningkat. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian sebelumnya yang menjelaskan peran desentralisasi fiskal dalam menekan ketimpangan pendapatan daerah melalui pertumbuhan ekonomi (Fitriah & Suryaningrum, 2023).

Di Indonesia, desentralisasi fiskal mulai diterapkan secara resmi sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memberikan otonomi lebih besar bagi daerah, termasuk dalam pengelolaan pajak dan retribusi. Meskipun terdapat upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi, tantangan utama adalah tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat (Akadun, 2024).

Efektivitas desentralisasi fiskal sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya keuangan yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang mampu memaksimalkan potensi desentralisasi fiskal umumnya memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dan kesenjangan pendapatan yang lebih rendah. Sebaliknya, daerah yang masih bergantung pada dana pusat sering kali menghadapi kesulitan dalam mencapai target pembangunan (Santi & Iskandar, 2021).

Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini memainkan peran sebagai variabel mediasi penting antara desentralisasi fiskal dan ketimpangan pendapatan daerah. Desentralisasi fiskal yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang kemudian berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, optimalisasi pengelolaan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan (Fitriah & Suryaningrum, 2023).

Tantangan lain dalam desentralisasi fiskal adalah pengaruh elit lokal dalam pengambilan keputusan fiskal. Ketergantungan pada elit ini dapat menghambat pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan menyebabkan ketimpangan hasil pembangunan. Untuk mengatasinya, diperlukan kebijakan fiskal yang lebih adil dari pemerintah pusat guna mendukung implementasi desentralisasi fiskal yang lebih efektif (Akadun, 2024).

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah pesisir dan wilayah pedalaman. Kebijakan desentralisasi yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan capaian pembangunan di kedua wilayah tersebut (Santi & Iskandar, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa selain mendukung peningkatan pendapatan daerah, desentralisasi fiskal juga memainkan peran penting dalam mendorong pemerataan pembangunan.

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah menjadi isu strategis dalam membahas pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun terdapat tantangan yang harus diatasi. Dalam hal ini, desentralisasi fiskal diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan mereka sendiri (Fitriah & Suryaningrum, 2023).

Pada periode 2021–2024, diperkirakan bahwa daerah dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik akan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka pendek, dengan estimasi pertumbuhan sekitar 5–7% per tahun pada daerah yang berhasil mengelola anggaran mereka secara efektif (Nanga & Hudang, 2023). Meski demikian, tantangan berupa pengelolaan dan alokasi anggaran yang kurang optimal tetap perlu diatasi.

Data dari Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam alokasi dana perimbangan untuk daerah selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, total dana perimbangan mencapai Rp 800 triliun dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1.000 triliun pada tahun 2024. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat desentralisasi fiskal sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan peningkatan alokasi ini, diharapkan daerah-daerah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengelola sumber daya secara mandiri, meningkatkan infrastruktur, serta menyediakan layanan publik yang berkualitas (Ali Hussain & Anis, 2024).

Kebijakan desentralisasi fiskal memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka. Hal ini tercermin dari peningkatan alokasi dana perimbangan yang mencapai Rp 800 triliun pada tahun 2020 dan diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 1.000 triliun pada tahun 2024. Dana perimbangan ini mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana bagi hasil pajak, yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah (Nanga & Hudang, 2023).

Kontribusi fiskal daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Daerah yang mampu mengelola PAD dan dana perimbangan secara efektif cenderung mencatatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2021, daerah dengan PAD yang tinggi mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%, sedangkan daerah dengan PAD rendah hanya tumbuh sebesar 3,2% (Nanga & Hudang, 2023). Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam hal investasi, data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa investasi asing langsung (FDI) dan investasi domestik (PMDN) juga menjadi faktor penting dalam mendukung perekonomian daerah. Pada tahun 2020, total investasi mencapai Rp 800 triliun,

dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 1.200 triliun pada tahun 2024. Sekitar 30% dari investasi ini berasal dari daerah yang berhasil menarik investasi melalui penerapan kebijakan desentralisasi fiskal yang baik (Suriadi dkk., 2024).

Namun, tantangan dalam pengelolaan fiskal daerah masih signifikan. Ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi, dengan dana perimbangan menyumbang 70% dari total pendapatan daerah. Meskipun PAD mengalami peningkatan, daerah perlu memperkuat basis pendapatan mereka untuk mencapai kemandirian fiskal (Nanga & Hudang, 2023). Dalam hal ini, peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran dan transparansi menjadi kunci keberhasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal, mengevaluasi kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan berkelanjutan, serta mengkaji pengaruh alokasi dana transfer terhadap pemerataan pembangunan antara daerah maju dan tertinggal. Penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran daerah, guna mendukung pembangunan yang inklusif, merata, dan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.

2. METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan kausal. Pendekatan ini dipilih untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel independen (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah). Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola ketimpangan pembangunan antar daerah.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria berikut:

- a. Daerah yang memiliki data lengkap terkait DAU, DAK, dan PAD selama 5 tahun terakhir (2020-2024).
- b. Daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan yang mengalami stagnasi.

- c. Jumlah sampel akan ditentukan berdasarkan representasi proporsional dari setiap provinsi di Indonesia.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

- a. Data Sekunder: Data diperoleh dari sumber resmi seperti Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Nota Keuangan, dan laporan daerah. Data mencakup informasi tentang DAU, DAK, PAD, tingkat pertumbuhan ekonomi, serta indikator pemerataan pembangunan (Indeks Pembangunan Manusia, tingkat kemiskinan, dan rasio Gini).
- b. Instrumen Penelitian: Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan form pencatatan data dari dokumen-dokumen resmi tersebut.

Alat Analisis Data

- a. Analisis Statistik Deskriptif: Untuk memberikan gambaran tentang distribusi data dan karakteristik variabel.
- b. Regresi Linier Berganda: Untuk menguji pengaruh DAU dan DAK terhadap PAD serta pertumbuhan ekonomi.
- c. Analisis Path: Untuk mengevaluasi peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi antara kebijakan fiskal dan pemerataan pembangunan.
- d. Koefisien Gini dan Rasio Ketimpangan: Untuk mengukur pemerataan pembangunan antarwilayah.

Model Penelitian

Model matematis yang digunakan adalah:

- a. $PAD = \beta_0 + \beta_1(DAU) + \beta_2(DAK) + \varepsilon$
- b. $Pertumbuhan\ Ekonomi = \beta_0 + \beta_1(PAD) + \beta_2(DAU) + \beta_3(DAK) + \varepsilon$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Dana Transfer dengan PAD

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan topik krusial dalam studi desentralisasi fiskal di Indonesia. DAU dan DAK adalah dua komponen utama dari transfer dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuan utama transfer ini adalah mengurangi kesenjangan fiskal antardaerah dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Septriani, 2023). Dalam konteks ini, pendekatan kuantitatif dan kualitatif diperlukan untuk memahami keterkaitan antara dana transfer dan PAD.

Data menunjukkan bahwa DAU dan DAK memiliki dampak signifikan terhadap PAD. Penelitian di Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam DAU berkontribusi pada peningkatan PAD sebesar 0,5% (Septriani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa DAU tidak hanya menjadi sumber pendanaan, tetapi juga mendorong daerah untuk meningkatkan penggalan PAD. Sementara itu, DAK yang diarahkan pada proyek-proyek spesifik turut memberikan insentif kepada daerah untuk meningkatkan pendapatan melalui pengelolaan yang lebih efektif.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2020, alokasi DAU mencapai Rp 400 triliun dan DAK Rp 100 triliun. Pada periode yang sama, PAD nasional tercatat sekitar Rp 300 triliun Menurut Sari, 2023. Meski terjadi peningkatan alokasi dana transfer, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih rendah, mencerminkan ketergantungan tinggi terhadap dana pusat.

Tabel 1. Alokasi Dana

<i>Tahun</i>	<i>DAU (Triliun Rp)</i>	<i>DBH (Triliun Rp)</i>	<i>DAK Fisik (Triliun Rp)</i>	<i>TKDD (Triliun Rp)</i>	<i>PAD Nasional (Triliun Rp)</i>
2020	427.1	106.1	53.8	856.9	298.2
2021	390.3	101.2	62.0	795.5	315.4
2022	378.0	105.3	60.9	769.6	330.5
2023	446.6	117.5	70.0	814.7	345.7
2024	451.0	120.0	75.0	830.0	360.0

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, BPS, Nota Keuangan RAPBN 2024

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia sangat dipengaruhi oleh alokasi dana transfer pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pada 2022, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp769,61 triliun, dengan DAU sebesar Rp378 triliun dan DBH Rp105,26 triliun (Septriani, 2023). Data menunjukkan kenaikan 1% DAU dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0665%, dengan dampak signifikan pada pembangunan infrastruktur dan layanan publik.

Daerah dengan alokasi transfer fiskal tinggi mencatatkan kenaikan PAD hingga 20% dalam lima tahun terakhir, dibandingkan hanya 5% untuk daerah dengan alokasi rendah. Hal ini menggarisbawahi peran dana transfer dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Kebijakan desentralisasi fiskal menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, desentralisasi fiskal memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri, yang

dapat meningkatkan efisiensi pengeluaran dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Studi menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal dapat memperbaiki efisiensi layanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun hasilnya bergantung pada konteks dan pelaksanaannya.

Salah satu aspek penting desentralisasi fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan prioritas lokal. Fokus pengeluaran untuk infrastruktur dan program sosial memiliki dampak besar. Sebagai contoh, penelitian di Sulawesi Selatan menemukan bahwa pengeluaran daerah untuk infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan PDB regional secara signifikan, di mana peningkatan 1% dalam belanja infrastruktur terkait dengan kenaikan 0,5% dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

Namun, terdapat tantangan besar dalam implementasi desentralisasi fiskal. Salah satu kendala utama adalah perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. Daerah-daerah yang memiliki sumber daya terbatas mungkin tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal, yang dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antar wilayah (Sanggrangbano & Timisela, 2024). Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk membantu daerah-daerah yang kurang mampu agar dapat mengoptimalkan kebijakan ini.

Namun, beberapa penelitian juga menunjukkan risiko dari desentralisasi fiskal. Implementasi yang tidak diiringi peningkatan kapasitas administrasi dapat menyebabkan pemborosan dan pengeluaran yang tidak efisien. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik.

Hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun desentralisasi fiskal memiliki potensi besar, keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah, dukungan dari pemerintah pusat, dan konteks lokal. Pendekatan yang holistik dan terintegrasi diperlukan agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara signifikan oleh efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Daerah yang mampu mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien cenderung mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang bergantung pada dana pusat. Sebagai ilustrasi, penelitian di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa realisasi APBD, termasuk elemen dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan peningkatan PDRB sebesar 5,2% per tahun antara 2017 hingga 2022.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Daerah yang mampu mengoptimalkan sumber daya lokal dan mengelola anggaran secara efisien cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan daerah yang masih bergantung pada dana pusat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

Pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia menjadi isu yang sangat relevan, terutama berkaitan dengan perbedaan antara daerah yang maju dan tertinggal. Ketimpangan yang ada dapat dilihat dari perbedaan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagai contoh, pada tahun 2022, IPM Jakarta tercatat sebesar 83,5, sedangkan di Papua hanya mencapai 60,2. Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya ketidakmerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan elemen dasar dalam pembangunan manusia.

Ketimpangan antara daerah maju dan tertinggal sangat terlihat dalam berbagai indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan rasio ketimpangan wilayah. Sebagai contoh, pada tahun 2022, IPM di Pulau Jawa tercatat 74,4, sementara di Kawasan Timur Indonesia (KTI) hanya 62,0, yang menggambarkan perbedaan kualitas hidup yang signifikan antara kedua wilayah tersebut. Tingkat kemiskinan di KTI juga masih cukup tinggi, mencapai 18%, sementara di Pulau Jawa hanya 7%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi yang besar, distribusi pembangunan yang tidak merata memperburuk kesenjangan antarwilayah.

Kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Dengan pengelolaan pajak dan alokasi anggaran yang efisien, pemerintah bisa membiayai berbagai program yang mendukung pengembangan daerah tertinggal. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan IPM (Aryansah dkk., 2024). Daerah yang memiliki kapasitas fiskal yang baik biasanya menunjukkan kinerja ekonomi yang lebih baik, terutama dibandingkan daerah yang masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan atau bahkan memperburuk kesenjangan pembangunan antarwilayah. Sering kali, alokasi belanja negara yang lebih besar diberikan kepada daerah

maju, sementara daerah tertinggal mendapatkan bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, selama tiga tahun terakhir, lebih dari 70% dari total belanja negara dialokasikan untuk wilayah Jawa-Bali, sedangkan Nusa Tenggara hanya menerima sekitar 3%. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ini memperlambat pembangunan di wilayah yang membutuhkan perhatian lebih. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang inklusif dan terfokus pada daerah tertinggal sangat dibutuhkan untuk memastikan pemerataan pembangunan yang lebih baik.

Rasio kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antarregional juga menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan. Pada tahun 2021, PDRB KTI hanya menyumbang 10,9% terhadap PDB nasional, meskipun wilayah KTI lebih luas dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang berkontribusi sekitar 81%. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa meskipun KTI memiliki potensi ekonomi yang besar, pengembangan infrastruktur dan investasi di wilayah ini masih sangat terbatas. Kebijakan fiskal yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dapat membantu meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi.

Kemiskinan merupakan indikator penting dalam menilai pemerataan pembangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di daerah tertinggal seperti Nusa Tenggara Timur mencapai 18,5%, sementara di Bali, yang merupakan daerah maju, tingkat kemiskinannya hanya 4,5%. Kebijakan fiskal yang mendorong pengembangan ekonomi lokal, seperti investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan, dapat membantu menurunkan tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam belanja modal pemerintah daerah berpotensi mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0,5% (Nurani & Saleh, 2023).

Koefisien Gini yang digunakan untuk mengukur ketimpangan wilayah menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang cukup besar. Di Indonesia, pada tahun 2022, koefisien Gini tercatat sebesar 0,38, dengan daerah perkotaan memiliki rasio yang lebih rendah dibandingkan daerah pedesaan. Kebijakan fiskal yang difokuskan untuk meningkatkan investasi di daerah tertinggal dapat membantu menurunkan tingkat ketimpangan ini. Misalnya, program yang mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketimpangan yang ada.

Penting untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal yang telah diterapkan untuk mengetahui dampaknya. Penggunaan data longitudinal dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang efektivitas kebijakan dalam mengurangi kesenjangan

pembangunan antarwilayah. Penelitian juga menunjukkan bahwa daerah yang menerapkan kebijakan fiskal berbasis data memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam mencapai tujuan pembangunan (Aryansah dkk., 2024).

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya sinergi yang baik, kebijakan fiskal dapat dijalankan lebih efektif, sehingga kesenjangan antara daerah maju dan tertinggal dapat dikurangi. Penelitian menunjukkan bahwa daerah yang menjalin kemitraan yang kuat dengan pemerintah pusat dalam pengelolaan keuangan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Nurani & Saleh, 2023).

Pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting dalam mengatasi kesenjangan antarwilayah. Proyek infrastruktur yang digagas oleh pemerintah telah membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Contohnya, pembangunan jalan tol dan fasilitas publik lainnya tidak hanya meningkatkan aksesibilitas, tetapi juga membuka peluang investasi baru dan menciptakan lapangan kerja. Namun, tanpa alokasi anggaran yang cukup untuk daerah tertinggal, manfaat dari proyek-proyek ini tidak akan tersebar merata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal yang dapat memastikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti memberikan kontribusi yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, terdapat tantangan besar berupa ketergantungan daerah pada transfer fiskal dari pemerintah pusat, yang memperlambat kemandirian fiskal daerah.

Meskipun alokasi dana transfer berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tertentu, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Daerah maju menunjukkan capaian pembangunan yang jauh lebih baik dibandingkan daerah tertinggal, sebagaimana terlihat dari indikator seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi kebijakan yang mendukung kemandirian fiskal. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran juga harus diperkuat untuk memastikan efisiensi pengeluaran yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah pusat

disarankan untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih adil dengan prioritas pembangunan daerah tertinggal, guna mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kolaborasi antar daerah dan dukungan pelatihan bagi pemerintah daerah akan menjadi kunci keberhasilan desentralisasi fiskal yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Akadun, A. (2024). Analysis of pseudo-decentralization and financial dependency in the implementation of regional autonomy in Sumedang Regency of Indonesia. *Public Policy and Administration*, 23(1), 9–22. <https://doi.org/10.5755/j01.ppaa.23.1.33295>
- Ali Hussain, S., & Anis, A. (2024). Analisis desentralisasi fiskal, pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(2), 230–237. <https://medrep.ppj.unp.ac.id/index.php/MedREP/login>
- Aryansah, J. E., Budiyanto, M. N., & Ismail, R. G. (2024). Optimalisasi pajak daerah untuk fasilitas publik: Studi efisiensi alokasi dan dampak pembangunan sosial. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(3), 2292–2302. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4751>
- Fitriah, L. D., & Suryaningrum, D. H. (2023). Peran mediasi pertumbuhan ekonomi pada pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, 6(1). <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/index>
- Nanga, M., & Hudang, A. K. (2023). Dampak desentralisasi fiskal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2206–2217. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13201>
- Nurani, I., & Saleh, M. (2023). Peran belanja modal sebagai efek mediasi pada kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Dimensi*, 12(1), 346–363. <https://doi.org/10.33373/dms.v12i1.5683>
- Sanggrangbano, A., & Timisela, S. I. (2024). The impact of special autonomy fiscal policy on Papua's economic development. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific*, 7(1), 1–13. <https://doi.org/10.32535/ijafap.v7i1.2878>
- Santi, S. D., & Iskandar, D. A. (2021). Kebijakan desentralisasi dan ketimpangan capaian pembangunan wilayah di Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(3), 490–506. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i3.198>
- Septriani, S. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 884–894. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>
- Suriadi, H., Frinaldi, A., Magriasti, L., & Yandri, L. (2024). Desentralisasi dan upaya peningkatan otonomi daerah: Menuju pembangunan berkelanjutan di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>